

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Perluasan Ancol Dikhawatirkan Merusak Ekosistem

DKI mengklaim perluasan ancول ini bukan reklamasi meski ada pantai yang dijadikan daratan.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah pegiat lingkungan menilai pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki konsep yang jelas untuk memulihkan kondisi Teluk Jakarta. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 mengenai perluasan kawasan Dunia Fantasi (Dufan) dan Taman Impian Ancol Timur yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA).

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengatakan keputusan Anies itu sama sekali tidak punya urgensi untuk perbaikan lingkungan di pantai Jakarta. "Membuat kebijakan tanpa konsep penulihan, ini yang membuat kami berkeberatan," ujar Tubagus, kemarin.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) juga mengecam keputusan Anies tentang perluasan kawasan wisata Ancol itu. Sebab, perluasan itu dilakukan dengan menguruk bibir pantai. Ia khawatir langkah ini dapat merusak ekosistem. "Reklamasi untuk perluasan Pantai Ancol akan memperparah kerusakan dua kawasan sekaligus, kawasan perairan Ancol di Teluk Jakarta dan lokasi tempat pengambilan material pasir," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati. "Ekosistem perairan semakin hancur, ekosistem darat akan mengalami hal serupa. Inilah bahayanya reklamasi."

Susan menilai izin reklamasi untuk keperluan rekreasi itu sebagai kebijakan yang ironis. Sebab, Anies pernah berjanji akan

menghentikan seluruh proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Izin perluasan kawasan rekreasi di pesisir Ibu Kota itu termuat dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020, yang ditandatangani Anies pada 24 Februari lalu. Dalam keputusan gubernur tersebut diatur tentang perluasan area Dufan seluas 35 hektare dan Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota, Heru Sunawan, mengatakan izin yang diberikan pemerintah kepada PT PJA itu bukan reklamasi, melainkan perluasan lahan. Ia berkeras bahwa perluasan lahan ini bukan reklamasi meski ada pantai yang diuruk menjadi daratan. "Bukan pulau itu, hanya memperluas daratan," kata dia, Senin lalu.

Elisa Sutanudiaia,

Executive Director The Rujak Center for Urban Studies, mengatakan klaim DKI itu tak masuk akal. Sebab, menurut dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sudah jelas mengatur definisi reklamasi. "Intinya menguruk laut itu, ya, reklamasi," ujar Elisa.

Meski perluasan lahan di

Ancol itu tidak berdampak langsung pada nelayan, kata Elisa, pengurukan pantai punya banyak risiko lain. Apalagi material yang digunakan untuk membuat daratan itu berasal dari kerukan 13 sungai di DKI. "Kita semua tahu seperti apa kondisi sungai-sungai di DKI," ucapnya. "Jadi, sekarang kita mindingkan pencemaran dari sungai ke laut tanpa ada kejelasan bagaimana mekanisme pengolahannya."

Elisa tak bisa memahami keputusan pemerintah DKI memberikan izin perluasan hingga ratusan hektare tersebut. Padahal, menurut dia, Anies sebenarnya bisa memberikan payung hukum hanya untuk lahan seluas 20 hektare yang saat ini sudah telanjur menjadi daratan. Selanjutnya, pemerintah memikirkan cara yang lebih baik untuk mengolah daerah aliran sungai agar tidak merusak lingkungan.

Head of Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol, Agung Praptono, mengatakan pihaknya memang memerlukan lahan untuk mengembangkan dua kawasan wisata, yaitu Dufan dan Taman Impian Ancol. Tujuan pengembangan ini adalah menjadikan Pantai Ancol sebagai destinasi wisata terbesar di Asia Tenggara. "Ini akan menguntungkan pemerintah DKI," ujar Agung.

Adapun Anies Baswedan belum mau berkomentar ihwal polemik izin perluasan lahan untuk pengembangan Dufan dan Taman Impian Jaya Ancol ini. Ia berjanji akan menjelaskan masalah ini dalam waktu dekat. "Nanti dijelaskan langkah sekalian, jangan *doorstop*," ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Selasa lalu.

• TAUFIQ SIDDIQ | INGE KLARA